



ANALISIS KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD DAN TINGKAT KEMANDIRIAN RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN TAHUN 2015-2019

Andy Slamet¹, Bambang Supeno²

^{1,2}Universitas Lancang Kuning (UNILAK), Pascasarjana Magister Manajemen
¹andyslamet@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 13 Januari 2022

Disetujui : 20 Januari 2022

Dipublikasikan : 28 Januari 2022

ABSTRAK

Kata Kunci:
Pola
Pengelolaan
Keuangan
(PPK) BLUD,
Tingkat
Kemandirian
Rumah Sakit

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Analisis Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD Terhadap Tingkat Kemandirian Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Jenis yang digunakan adalah data sekunder runtut waktu (*time series*) yang meliputi aspek kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD dan tingkat kemandirian rumah sakit selama kurun waktu 2015-2019. Kepatuhan pengelolaan Keuangan BLUD diukur dengan melihat pada Laporan Evaluasi Kinerja RSUD dan Tingkat Kemandirian diukur dengan rasio kemandirian rumah sakit. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD masih belum memenuhi standar sedangkan Tingkat Kemandirian BLUD RSUD Puri Husada Tembilahan telah memenuhi standar yang diharapkan.

ABSTRACT

Keywords:
BLUD
Financial
Management
Pattern (PPK),
Hospital
Independence
Level

This study aims to analyze the Compliance Analysis of BLUD Financial Management on the Level of Independence of the Puri Husada Tembilahan Regional General Hospital which has been designated as a Regional Public Service Agency (BLUD) since 2012. This study uses a descriptive research method. The type used is time series secondary data which includes aspects of BLUD financial management compliance and the hospital's level of independence during the 2015-2019 period. BLUD financial management compliance is measured by looking at the Hospital Performance Evaluation Report and the level of independence is measured by the hospital independence ratio. The analytical method used in this research is descriptive analysis. The results showed that the compliance of BLUD financial management still did not meet the standards, while the level of independence of the BLUD RSUD Puri Husada Tembilahan had met the expected standards.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Badan Layanan Umum menyatakan bahwa BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah yang mengelola kekayaan negara atau daerah yang tidak dipisahkan dan instansi tersebut diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangannya, contohnya adalah rumah sakit dan universitas. Hal tersebut memicu adanya agenda reformasi keuangan negara yang menghasilkan pergeseran dari penganggaran tradisional ke penganggaran berbasis kinerja. Dengan basis kinerja, arah penggunaan dana pemerintah menjadi lebih jelas dari sekedar membiayai input dan proses menjadi berorientasi pada output, dengan kata lain, dana pemerintah digunakan secara efisien dan efektif, berorientasi pada kinerja dan hasil (Waluyo, 2011).

Dengan adanya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan serta adanya Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengamanatkan bahwa rumah sakit yang didirikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pada awal tahun 2012 Menteri Kesehatan Republik Indonesia menegaskan rumah sakit daerah wajib menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Pasal 1 PP 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK – BLU) menyatakan Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Mentari et al : 2018)

Dalam rangka upaya tersebut perlu dilakukan penataan kembali manajemen rumah sakit, termasuk pola pengelolaan keuangannya, agar rumah sakit dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka rumah sakit perlu diberikan status sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Diharapkan dengan status tersebut kondisi keuangan rumah sakit lebih sehat dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan mutu pelayanan kesehatan meningkat. (Debby Firoeza Indiany, dkk, 2016).

Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan sehingga rumah sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan dapat bersaing dengan kompetitornya. Hasil penelitiannya menunjukkan tren kinerja pelayanan belum sesuai dengan standar tipe rumah sakit sehingga kinerja keuangannya pun relatif stagnan.(Masnah , 2012).

Analisis kinerja keuangan diperlukan untuk menilai kemampuan keuangan sebuah rumah sakit, salah satunya dengan menggunakan rasio kemandirian. Rasio kemandirian sangat cocok untuk mengukur kemampuan keuangan sebuah BLUD rumah sakit karena BLUD dituntut untuk dapat mandiri dalam mengelola pendapatan dan sumber daya lain yang ada, sebuah BLU/BLUD dianggap berhasil apabila sudah tidak ada lagi campur tangan pemerintah dalam mendanai operasionalnya. (Candrasari et al., 2018)

Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk mengetahui Analisis Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD Terhadap Tingkat Kemandirian RSUD Puri Husada Tembilahan yang pada tahun 2012 ditetapkan menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh berdasarkan Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor 387/VIII/HK-Tahun 2012 Tanggal 15 Agustus 2012 tentang Penetapan Status Penuh Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan. Dengan demikian rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah adanya korelasi antara Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD dengan tingkat kemandirian rumah sakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis antara Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD dengan tingkat kemandirian rumah sakit.

KAJIAN PUSTAKA

Pembahasan dalam kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain : Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD dan Tingkat Kemandirian rumah sakit.

1. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya dan BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah. Maksud dari Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah).

Menurut Mediya (2013), BLUD adalah instansi pemerintah yang memberikan layanan penyediaan barang dan jasa. Ini adalah karakter utama dari BLUD. Instansi pemerintah bisa saja bukan penyedia barang dan jasa secara langsung kepada masyarakat, badan-badan usaha, ataupun organisasi- organisasi lainnya, namun instansi tersebut lebih diarahkan sebagai sebagai unit regulator atau pembuat kebijakan agar berjalannya aktivitas bisnis dan sosial masyarakat dengan lebih baik. Instansi pemerintah ini tidak akan pernah atau sangat jarang sekali berhubungan secara langsung dengan masyarakat sebagai pengguna.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 36/PB/2016 tanggal 28 Sept 2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Kesehatan menjelaskan bahwa kepatuhan pengelolaan Keuangan BLU/BLUD digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan BLUD terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BLU/BLUD. Kepatuhan yang dimaksud adalah, meliputi :

1. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Anggaran (RBA) definitif;
2. Penyusunan dan penyampaian laporan kuangan BLUD berdasarkan standar akuntansi keuangan;

3. Penyampaian surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLUD;
4. Persetujuan tarif layanan;
5. Penetapan sistem akuntansi;
6. Persetujuan pembukaan rekening;
7. Penyusunan *Standard Operating Procedures* (SOP) pengelolaan kas;
8. Penyusunan SOP pengelolaan piutang;
9. Penyusunan SOP pengelolaan utang;
10. Penyusunan SOP pengadaan barang dan jasa;
11. Penyusunan SOP pengelolaan barang inventaris.

Pengaruh tingkat kemandirian terhadap kepatuhan pengelolaan keuangan kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD, Mentari Candrasari, et.al (2018) menjelaskan bahwa tingkat kemandirian merupakan kemampuan untuk membiayai seluruh belanja dari pendapatan fungsional BLUD, baik belanja operasional maupun investasinya. Pendapatan fungsional adalah total dari pendapatan fungsional dengan subsidi dan ini berkorelasi dengan kepatuhan penilaian kinerja BLUD baik dari aspek keuangan dan aspek pelayanan dan ini dilakukan secara tahunan.

2. Tingkat Kemandirian

Menghitung Rasio kemandirian merupakan salah satu cara untuk menilai kemampuan BLUD dalam mendanai seluruh aktivitasnya. Kualitas kemandirian keuangan sangat tergantung dari jumlah pendapatan asli BLU/BLUD dan jumlah pendapatan transfer, semakin tinggi pendapatan asli atau semakin rendah pendapatan transfer maka akan semakin tinggi kualitas kemandirian BLU/BLUD tersebut. Tingginya pendapatan sebuah rumah sakit tidak akan terlepas dari baiknya kualitas pelayanan dan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit (Rensiner et al., 2018).

Kemandirian keuangan (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Satuan Kerja dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar biaya pelayanan sebagai sumber pendapatan yang diperlukan OPD. Rasio kemandirian keuangan rumah sakit dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli rumah sakit dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah daerah dan propinsi serta pinjaman daerah (Mahmudi, 2007). Semakin tinggi angka rasio kemandirian RS menunjukkan rumah sakit semakin tinggi kemandirian keuangannya. Rumusan Rasio kemandirian (Mahmudi, 2007:128):

$$TK = \frac{\text{Pendapatan Operasional RS}}{\text{Belanja Operasional} + \text{Belanja Investasi}} \times 100\%$$

3. Rumah Sakit

Menurut WHO (*World Health Organization*), rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. (UU RI nomor 44 tentang Rumah Sakit tahun 2009).

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit mulai dari yang bersifat dasar, spesialis, hingga sub spesialis yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak Pemerintah Daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit berdasarkan tingkatan klasifikasi Rumah Sakit menurut kemampuan unsur pelayanan kesehatan yang dapat disediakan, ketenagaan, fisik dan peralatan, maka Rumah Sakit umum pemerintah pusat dan daerah diklasifikasikan antara lain :

- 1) Rumah Sakit Umum Kelas A adalah Rumah Sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 5 (lima) spesialis penunjang medik, 12 (dua belas) spesialis lain dan 13 (tiga belas) sub spesialis.
- 2) Rumah Sakit Umum Kelas B adalah Rumah Sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 4 (empat) spesialis penunjang medik, 8 (delapan) spesialis lain dan 2 (dua) sub spesialis dasar.
- 3) Rumah Sakit Umum Kelas C adalah Rumah Sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar dan 4 (empat) spesialis penunjang medik.
- 4) Rumah Sakit Umum Kelas D adalah Rumah Sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) spesialis dasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu dengan pengumpulan data sekunder melalui laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan rumah sakit. Deskriptif penelitian menggambarkan kondisi objek penelitian lebih mendalam tanpa adanya hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dan dari rujukan teoritis yang relevan (buku, buletin, jurnal, majalah, surat kabar serta internet). (Hasanah et al :2017). Jenis data sekunder yang dikumpulkan melalui laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan RSUD Puri Husada Tembilahan tahun 2015 sampai dengan 2019.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah RSUD Puri Husada Tembilahan yang telah ditetapkan sebagai BLUD. Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan *Purposive Sampling*, yaitu dengan menentukan jenis data apa saja yang dibutuhkan dan pada tahun kapan saja yang dijadikan sebagai sampel.

Defenisi Operasional Variabel

1. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD

Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan BLUD terhadap Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pengelolaan Keuangan BLUD meliputi :

- 1) Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif
- 2) Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
- 3) Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD
- 4) Tarif Layanan
- 5) Sistem Akuntansi
- 6) Persetujuan Rekening
- 7) SOP Pengelolaan Kas
- 8) SOP Pengelolaan Piutang
- 9) SOP Pengelolaan Utang
- 10) SOP Pengadaan Barang dan Jasa
- 11) SOP Pengelolaan Barang Inventaris

2. Tingkat Kemandirian rumah sakit (%)

Tingkat Kemandirian BLUD adalah rasio yang menunjukkan seberapa mampu Rumah Sakit membiayai seluruh belanja dari pendapatan fungsionalnya baik belanja operasional maupun belanja investasinya.

Rumusnya :

$$TK = \frac{\text{Pendapatan Operasional RS}}{\text{Belanja Operasional} + \text{Belanja Investasi}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dari rasio tingkat kemandirian rumah sakit dan penilaian kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 36/PB/2016 tanggal 28 Sept 2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Kesehatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Penggunaan analisis deskriptif penelitian ditunjukkan untuk mengetahui gambaran kinerja keuangan BLUD RSUD Puri Husada Tembilahan dilakukan dengan menghitung rasio tingkat kemandirian rumah sakit dan perkembangan rasio tersebut yang dilihat dari Laporan Keuangan BLUD RSUD Puri Husada Tembilahan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Informasi yang disajikan mengenai karakteristik variabel penelitian tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 1 : Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD

No.	Variabel	Nilai Capaian pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Penyusunan Dan Penyampaian Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Definitif;	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00
2	Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan BLUD Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan;	1,90	1,00	1,40	0,75	1,00
3	Penyampaian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja BLUD;	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00
4	Persetujuan Tarif Layanan;	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Penetapan Sistem Akuntansi;	0,60	1,00	0,80	1,00	1,00
6	Persetujuan Pembukaan Rekening;	0,40	1,00	0,50	0,50	1,00
7	Penyusunan Standard Operating Procedurs (SOP) Pengelolaan Kas;	0,50	1,00	0,30	0,25	1,00
8	Penyusunan SOP Pengelolaan Piutang;	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00
9	Penyusunan SOP Pengelolaan Utang;	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00
10	Penyusunan SOP Pengadaan Barang Dan Jasa;	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00
11	Penyusunan SOP Pengelolaan Inventaris.	0,50	1,00	0,50	0,25	1,00
Jumlah		10,40	11,00	10,00	7,25	11,00

Sumber : Data Olahan Laporan Evaluasi Kinerja BLUD RSUD Puri Husada Tembilahan

Tabel 2 : Tingkat Kemandirian Rumah Sakit

No.	Variabel	Nilai Capaian pada Tahun					Rata-rata
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Tingkat Kemandirian Rumah Sakit	105,61%	127,31%	96,62%	102,28%	110,36%	108,44%

Sumber : Data Olahan Laporan Keuangan RSUD Puri Husada Tembilahan
 Dari Tabel 1 dan Tabel 2 diatas dapat dijelaskan antara lain :

1. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD

Kepatuhan Pengelolaan Keuangan merupakan penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan BLUD terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pada Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 skor penilaian terhadap kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD didapatkan angka tertinggi pada tahun 2016 dengan skor sebesar 11,00 dan angka terendah diperoleh pada tahun 2018 yaitu sebesar 7,25. Jika dibandingkan dengan standar BLUD bahwa Skor terhadap Sub Aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD terbaik minimal 11, maka BLUD RSUD Puri Husada Tembilahan sampai dengan tahun 2019 rata-rata telah memenuhi standar.

2. Tingkat Kemandirian Rumah Sakit

Tingkat Kemandirian Rumah Sakit BLUD merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemandirian BLUD dalam membiayai seluruh belanjanya baik belanja operasional maupun belanja investasinya dari pendapatan fungsional rumah sakitnya. Semakin besar angka Tingkat Kemandirian Rumah Sakit tersebut maka akan semakin baik kinerja BLUDnya. BLUD Rumah Sakit dikatakan memiliki kinerja keuangan yang paling bagus jika angka Tingkat Kemandiriannya di atas 100%.

Pada Tahun 2015 sampai dengan 2019 tingkat kemandirian RSUD Puri Husada Tembilahan mengalami fluktuasi. Angka tertinggi didapatkan pada tahun 2016 sebesar 127,31 %, mengalami tren menurun pada 2017 sebesar 96,62%, dan naik kembali pada 2018 sebesar 102,28% dan 2019 sebesar 110,36%. Jika dibandingkan dengan standar pengukuran yang diharapkan maka BLUD RSUD Puri Husada Tembilahan telah memenuhi standar yang diharapkan. Hal ini berarti BLUD RSUD Puri Husada Tembilahan telah mampu membiayai belanja operasional maupun belanja investasinya dari pendapatan fungsionalnya.

SIMPULAN

Berikut ini adalah simpulan berdasarkan penilaian kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 36/PB/2016 dan Tingkat Kemandirian BLUD rumah sakit :

1. Rata-rata skor penilaian kinerja keuangan berdasarkan Sub Aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar 9,93 jika dibandingkan dengan standar BLUD Layanan Kesehatan minimal sebesar 11 maka BLUD RSUD Puri Husada Tembilahan juga belum memenuhi standar yang diharapkan.
2. Rata-rata skor penilaian Tingkat Kemandirian BLUD RSUD Puri Husada Tembilahan adalah sebesar 108,44 %, jika dibandingkan dengan standar tingkat kemandirian rumah sakit sebesar 100% maka BLUD RSUD Puri Husada juga telah memenuhi standar yang diharapkan dan mampu mandiri untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Mentari Candrasari , Taufik Kurrohman, Nining Ika Wahyuni. 2018. Analisis Kinerja Keuangan dan Pelayanan dengan Kemandirian Rumah Sakit di RSUD Dr.Abdoer Rahem Situbondo. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*,V (1) : 94-99.
- Anna Aurelia, Eka Pujiyanti. 2015. Biaya Satuan dan Pemulihan Biaya (Cost Recovery Rate) Layanan Pasien Acute Coronary Syndrome dengan Rawat Inap di Rumah Sakit X Tahun 2015, Volume 1, Nomor 3 *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*
- Afrida Ariyani. 2021. Kajian Kemandirian Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 3.
- Muhammad Ridwan, Septarina Prita D. S., Sudarno. 2019. Klasifikasi Biaya Lingkungan pada Rumah Sakit Jember Klinik. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 2019, Volume VI (1) : 102-107.
- Nindya Tyas Hasanah, Novi Wulandari Widiyanti, Sudarno. 2017. Analisis Pengaruh GCG dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 2017, Volume V (2) : 115-120
- Shella Iko Sita, Ririn Irmadariyani, Andriana. 2017. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 2017, Volume IV (1) : 40-43
- Wahyu Kharismaputri, Ulfi Kartika Oktaviana. 2020. Kinerja Keuangan dan Manajemen Wakaf Sabilillah Malang. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 2020, Volume VII (2) : 136-142
- Debby Firoeza Indiany, Dien Noviany Rahmatika dan Jaka Waskito. 2016. Jurnal analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan PPK-BLUD Pada RSUD Kardinah. *MULTIPLIER–Vol. I No. 1 November 2016*.
- Masnah. 2012. *Analisis rasio financial dan rasio nonfinancial* sebagai dasar pengukuran kinerja RSUP dr. Muhammad hoesin palembang. *Jurnal Manajemen Pelanggan Kesehatan*. Universitas Binadarma.
- Madjid, Noor Choolis., Cahyono, Heru, dan Tohirin. 2009. Evaluasi antara kinerja keuangan dan operasional pada rumah sakit umum pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan badan layanan umum. *Kajian Akademis*. BPPK
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2005. *Buku Petunjuk Pengisian, Pengelolaan dan Penyajian Data Rumah Sakit*. Jakarta: Penerbit Dikjen Bina Pelayanan Medik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 79 Tahun 2018, Badan Layanan Umum Daerah.
- Rr. Murni Indah Wijayanti, Gregorius N. Masdjojo. 2017. Evaluasi Kinerja Keuangan Pada BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun 2011 – 2015. *Telaah Manajemen* Vol. 14 Edisi 2, Oktober 2017, hal 1 – 17. Program Pascasarjana, Universitas Stikubank.